



Legislatif Temukan TPA Belum Berizin

KOMISI D DPRD Kota Yogyakarta menggulirkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lembaga penitipan anak (TPA) atau daycare di wilayahnya, Senin (11/5). Langkah ini diambil untuk memastikan aspek legalitas serta standar keamanan pengasuhan anak demi menjamin perlindungan terhadap buah hati, buntut kasus Little Aresha Daycare di Kemantren Umbulharjo.

Dalam tinjauan lapangan tersebut, para legislator pun menemukan fakta mengejutkan, di mana salah satu daycare ditemukan telah beroperasi selama satu dekade tanpa mengantongi izin resmi.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, menegaskan, fokus utama pemantauan adalah menyasar kelengkapan perizinan, kelayakan sarana dan prasarana, SOP, hingga kurikulum pengasuhan yang diterapkan. Dalam sidak tersebut, ia menandaskan, legalitas bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan fondasi utama layanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

"Ada daycare yang secara pola asuh dan kurikulum sebenarnya sudah bagus. Sayangnya, ada kendala izin usaha meski sudah 10 tahun beroperasi. Kami dorong pengelola segera menindaklanjuti. Ini bukan sekadar administratif, tapi jaminan keamanan bagi anak yang dititipkan," tegasnya.

Kendati demikian, Darini bilang, pengelola daycare tersebut memiliki komitmen tinggi terhadap as-



ISTIMEWA

SIDAK - Jajaran Komisi D DPRD Kota Yogya saat menggulirkan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu daycare, Senin (11/5).

pek hukum dan saat ini tengah memproses aspek legalitasnya. Legislatif pun memberikan apresiasi atas kepatuhan itu, dan meminta agar proses administratif segera dituntaskan supaya operasional layanan tidak terganggu.

Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, menyatakan, temuan di lapangan ini akan jadi bahan evaluasi penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menekankan, pengawasan ketat sangat diperlukan agar malpraktik dalam pola pengasuhan anak seperti yang terjadi di Little Aresha Daycare tidak terulang kembali.

"Hasil temuan ini akan kami bawa ke rapat kerja untuk reko-

mendasi kepada eksekutif. Sinergi antara pengelola, dinas, dan legislatif penting demi ekosistem pengasuhan yang aman dan berstandar," ujarnya.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Komisi D berencana melakukan kaji ulang terhadap regulasi yang ada, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal).

Upaya ini bertujuan untuk memperkuat payung hukum sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengakses prosedur perizinan yang transparan dan akuntabel. "Melalui penataan regulasi, diharapkan orang tua mendapatkan kepastian serta rasa aman saat menitipkan anak-anak mereka," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005